

## **TEORI BASIS EKSPOR MASA KINI DI ARAB SAUDI**

***Siti Sutriah Nurzaman***

*Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan*  
*Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung*  
*Labtek IXA Lt.5 Jalan Ganesha No.10, Bandung 40132, Indonesia*  
*sutriah\_nurzaman@yahoo.com*

### ***Abstract***

*It seems that Export Base Theory particularly in the natural resource export base case is considered as an obsolete theory and barely discussed again in planning journals. This paper tries to revisit the application of economic base concept for Arab Saudi case. Data, references and observation of Saudi Arabia case, strongly proof that Saudi Arabia has developed successfully implementing development concept that heavily rely on this theory. The five year development plans of Saudi Arabia shows a very strong influence of the theory. Many regions in Indonesia show similarity to Arab Saudi in which has prosperous natural resources. They can take lessons to imitate the succes of Arab Saudi.*

***Keywords:*** *export base theory, location quotient, multiplier effect*

### **I. PENDAHULUAN**

Teori Basis Ekspor atau biasa disebut sebagai *Export Base Theory*, pertama kali diperkenalkan oleh Douglass C. North dalam artikelnya berjudul *Location Theory and Regional Economic Growth* (North, 1964). Teori Basis Ekspor ini membantah teori yang pada waktu itu berkembang, yaitu teori Perkembangan Bertahap (*Stages Theory*) yang dipelopori oleh Hoover dan Fisher. North membantah teori Hoover dan Fisher yang menyatakan bahwa perkembangan wilayah berlangsung secara bertahap dan teratur dari ekonomi subsisten, spesialisasi lokal, pertanian yang lebih maju (buah-buahan, peternakan, sayuran), industrialisasi, hingga kemudian tahap terakhir adalah ekspor, baik ekspor komoditas maupun jasa (North, 1955). North menyatakan bahwa perkembangan tidak perlu selalu demikian. Bantahan North terhadap teori yang dikemukakan oleh Hoover dan Fisher didasari oleh dua alasan. Pertama, dilihat dari sudut ekonomi, terutama teori lokasi, peralihan dari pertanian ke industri adalah proses yang sukar sekali. Tidak semua wilayah mampu mengadakan peralihan. Kedua, perkembangan yang bertahap seperti yang diajukan Hoover dan Fisher sama sekali tidak cocok dengan perkembangan di Amerika Serikat dan Kanada. Di Amerika Serikat relatif tidak ada wilayah

yang berkembang mulai dari ekonomi subsisten. Hampir semua wilayah di Amerika Serikat berkembang karena pengaruh luar. Wilayah-wilayah tersebut berkembang untuk memenuhi permintaan luar wilayah. Contoh klasik yang diberikan oleh North adalah wilayah Pacific Northwest, yang bahkan sebelum ada penduduk dalam jumlah besar pun, telah mengekspor bulu binatang (untuk mantel) ke Eropa. Setelah jumlah penduduk makin berkembang, wilayah ini tidak pernah tumbuh hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, akan tetapi tumbuh karena mengekspor kayu, terigu serta gandum, baik ke berbagai wilayah di Amerika Serikat, maupun ke berbagai belahan dunia. Sekarang, walaupun ekonomi Pacific Northwest telah jauh terdiversifikasi yang ditandai oleh adanya pabrik pesawat Boeing serta berbagai industri lainnya, akan tetapi wilayah Pacific Northwest tidak pernah dianggap melampaui ekonomi subsisten, ataupun industrialisasi. Ekonomi Pacific Northwest tetap bertumpu pada ekspor sebagai dasar ekonomi utama, walau sekarang ekspornya telah jauh terdiversifikasi.

Dengan tumbuhnya teori-teori pertumbuhan lain serta konsep pertumbuhan yang berdasarkan teori tersebut (sebagai contoh konsep Kutub Pertumbuhan yang berdasar pada teori ekonomi Neo-klasik), maka Teori Basis Ekspor ini seakan-akan dilupakan, apalagi dijadikan dasar sebagai konsep perkembangan. Akan tetapi, pengamatan lapangan di Arab Saudi pada 2008, menunjukkan berbagai produk industri makanan minuman buatan Arab Saudi banyak terdapat di pasar. Berbagai data yang didapat membuktikan bahwa Arab Saudi telah menerapkan Teori Basis Ekspor ini sebagai dasar konsep pembangunannya. Ekonomi Arab Saudi yang dimotori oleh ekspor minyak bumi telah secara sadar direncanakan untuk memberi efek pengganda ke sektor-sektor lain, sehingga ekonomi Arab Saudi telah menuju pada diversifikasi.

## **II. TEORI BASIS EKSPOR**

Sebenarnya gagasan teori Basis Ekspor dari North dilhami oleh karya-karya Innis mengenai ekonomi Kanada. Dalam karya-karyanya, Innis menyampaikan bahwa ekonomi Kanada berkembang dari apa yang disebutnya sebagai *export staples*, yaitu komoditas utama yang dihasilkan oleh wilayah tersebut. Dalam gagasan Innis, komoditas ini berupa hasil dari kegiatan ekstraktif (pertambangan, kayu, berbagai hasil pertanian seperti gandum, dan lain-lain) yang merupakan sektor ekonomi yang dominan di wilayah tersebut. Dalam konsep North, komoditas ini tidak perlu selamanya industri ekstraktif, akan tetapi produk dari industri sekunder bahkan tersier pun, dapat menjadi komoditas ekspor tersebut. Oleh karena itu, North tidak mempergunakan istilah *export staples* seperti Innis, akan tetapi *exportable commodities*. Akan

tetapi, di wilayah yang perkembangannya masih pada tahap awal yang masih bergantung pada industri ekstraktif, istilah *export staples* dari Innis ini sama dengan *exportable commodities* dari North (North, 1955). Agar *export staples* atau *exportable commodities* ini dapat bersaing dengan komoditas yang sama dari wilayah serta negara lain, maka ongkos produksi komoditas tersebut harus ditekan. Sesuai dengan teori lokasi, untuk menekan ongkos produksi ini, biaya transport dan prasarana lainnya harus ditekan. Oleh sebab itu, semua wilayah yang baru berkembang, berusaha keras untuk membangun prasarannya, baik jalan raya, energi, pelabuhan, maupun yang lebih lunak seperti tenaga kerja yang terampil (North, 1955).

Bagaimana *exportable commodities* ini dapat mengembangkan wilayah, diterangkan oleh North dengan membagi aktivitas ekonomi dalam dua golongan, yaitu industri ekspor (*export industries*) dan industri setempat (*residential industries*). Industri setempat adalah industri yang khusus melayani kebutuhan penduduk lokal. Apabila wilayahnya betul-betul merupakan wilayah baru maka hal ini mudah terlihat, seperti Pacific Northwest atau Kanada dari Innis, yang memiliki industri kayu, gandum dan terigu. Persoalan menjadi lain apabila perkembangan wilayah telah kompleks. Dengan makin kompleksnya struktur ekonomi, tidak mudah untuk memisahkan antara industri ekspor dan industri setempat. Untuk itu, North memakai metode yang diperkenalkan oleh Hilderbrand dan Mace, yaitu dengan memakai kuosien lokasi atau *location quotient* atau biasa disingkat l.q. *Location quotient* ini menunjukkan besarnya konsentrasi industri di wilayah studi, dengan besarnya konsentrasi industri di wilayah yang menjadi *benchmark*, misalnya di seluruh negara (North, 1964). Secara formal sebagai mana dituliskan Richardson (Richardson, 1969) *location quotient* dapat dinyatakan dengan rumus matematik sebagai:

$$LQ = \frac{R_i / R}{N_i / N}$$

dimana:  $R_i$  = banyaknya tenaga kerja (atau juga PDRB) di sektori  $i$  di wilayah R

$R$  = banyaknya keseluruhan tenaga kerja (atau juga PDRB) di wilayah R

$N_i$  = banyaknya tenaga kerja (atau juga PDRB) di sektor  $i$  di seluruh negara

$N$  = banyaknya keseluruhan tenaga kerja (atau juga PDRB) di seluruh negara

Dari rumus tersebut, dengan tetap harus mematuhi asumsi-asumsi tertentu, industri digolongkan sebagai industri ekspor dan industri setempat. Apabila  $l.q$  dari sektor tersebut lebih besar dari satu, maka industri tersebut adalah industri ekspor. Apabila  $l.q$  lebih kecil dari satu, maka industri tersebut adalah industri setempat. Walaupun demikian, Hilderbrand dan Mace menyatakan bahwa dalam studi mereka di Los Angeles County, karena faktor permintaan, industri yang memiliki  $l.q$  lebih besar dari satu, masih tetap bisa digolongkan sebagai industri setempat. Menurut Hilderbrand dan Mace, batas yang lebih tepat antara industri setempat dan industri ekspor untuk Los Angeles County ini adalah 1,508. Jadi nilai satu itu bukanlah suatu nilai yang mutlak (North, 1955).

Dengan mengetahui industri ekspor (sering juga disebut sebagai industri basis – *basic industry*) dan industri setempat (sering juga disebut industri jasa – *service industry*), maka dapat diketahui efek penggandanya. Efek pengganda adalah angka yang menunjukkan banyaknya tenaga kerja (atau bisa juga PDRB) di seluruh sektor ekonomi yang terbentuk karena adanya kegiatan industri basis. Menurut Davis (1990), keseluruhan aktivitas industri yang terjadi  $Y$ , dinyatakan dengan  $Y = (1 + k) E$ .  $E$  adalah besarnya aktivitas ekspor, sedangkan  $(1 + k)$  adalah efek pengganda. Besarnya  $k$  ditentukan oleh rasio antara sektor jasa dan sektor ekspor, atau dapat dinyatakan sebagai  $k = S/E$ . Besarnya  $S$  dan  $E$  ini didapat dari perhitungan  $l.q$  di atas. Dari perhitungan  $l.q$ ., dijumlahkan seluruh aktivitas ekspor, yaitu  $E$ , dan seluruh aktivitas servis yaitu  $S$ . Karena  $E$  dan  $S$  merupakan nilai yang positif, maka  $S/E$  juga selalu positif, sehingga  $(1 + k)$  selalu positif. Kembali ke  $Y = (1 + k)E$ , maka dapat dilihat bahwa ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu besarnya ekspor dan besarnya pengganda. Dengan kata lain, seandainya suatu wilayah mempunyai nilai ekspor yang besar, maka karena pengaruh efek pengganda, ekonomi wilayah akan berkembang dengan besar pula. Dapat pula dikatakan, bahwa ekspor akan menyebabkan suatu wilayah, ekonominya berkembang karena adanya efek pengganda, jadi ekspor dapat menggerakkan ekonomi wilayah setempat. Hal ini yang dinyatakan oleh North terjadi pada wilayah Pacific Northwest. Ekonomi Pacific Northwest menjadi terdiversifikasi karena pengaruh sektor ekspor, kayu, gandum dan terigu.

### **III. PERKEMBANGAN ARAB SAUDI BERDASARKAN TEORI BASIS EKSPOR**

Ekonomi Arab Saudi dapat dikatakan sebagai ekonomi minyak. Minyak bumi ditemukan oleh ahli geologi Amerika Serikat pada tahun 1930. Akan tetapi, minyak bumi ini baru dieksploitasi setelah Perang Dunia II oleh perusahaan Amerika, ARAMCO. Pada tahun 1970 pada masa pemerintahan Raja Faisal,

ARAMCO dinasionalisasi oleh Arab Saudi menjadi milik pemerintah Arab Saudi dan namanya diganti menjadi SAUDIA ARAMCO (U.S. Department of State, 2007).

Minyak ini memberikan berkah bagi Arab Saudi. Ledakan harga minyak pada tahun 1970, menyebabkan penghasilan Arab Saudi menjadi sangat besar, walaupun sejak tahun 1960, pengembangan ekonomi sudah dipikirkan secara serius dengan bermodalkan minyak ini. Minyak memberikan peran penting bagi ekonomi Arab Saudi terlihat dari kenyataan bahwa sampai sekarang pun setelah ekonomi Arab Saudi mulai terdiversifikasi, sektor minyak menyumbang 45 % dari pendapatan negara, 45% dari PDRB dan 90% dari penghasilan ekspor. Bahkan sektor perminyakan ini pernah menyumbang 75% dari pendapatan negara. Dilihat dari sudut internasional pun, sektor perminyakan ini merupakan sektor yang sangat penting karena 25% dari cadangan minyak dunia, berada di Arab Saudi (U.S. Department of State, 2007).

Peran minyak ini sedemikian besarnya bagi Arab Saudi sehingga pada tahun 1970-an ketika harga minyak melonjak naik, PDB perkapita penduduk Arab Saudi pun melonjak naik sebesar 1.856%. Pada tahun 1980-an, ketika harga minyak mulai turun sejak tahun 1977, PDB perkapita turun 58% dan kembali meningkat sebesar 20% pada tahun 1990-an setelah pemerintah Arab Saudi melakukan diversifikasi ekonomi. Menyadari bahwa minyak sangat menentukan ekonomi Arab Saudi, pada tahun 1970 Arab Saudi menasionalisasi ARAMCO sehingga menjadi milik kerajaan Arab Saudi dan mengganti namanya menjadi SAUDIA ARAMCO. SAUDIA ARAMCO ini memegang lebih dari 95% seluruh produksi minyak Arab Saudi. Pada tahun 1993 SAUDIA ARAMCO meliputi juga SAMAREC, perusahaan negara yang mengatur pemasaran dan penyulingan (*refinery*), sehingga SAUDIA ARAMCO menjadi perusahaan minyak terintegrasi terbesar di dunia. Selain itu, SABIC (Saudi Arabia Basic Industry Corporation) juga merupakan perusahaan petrokimia terbesar di dunia (U.S. Dept. of State, 2007).

Walaupun minyak memberi kemakmuran luar biasa bagi Arab Saudi, akan tetapi pemerintah Arab Saudi sadar bahwa ekonominya tidak dapat digantungkan hanya pada minyak saja. Oleh sebab itu, mulai tahun 1970, disusun rencana pembangunan ekonomi, walaupun sebenarnya kesadaran untuk membangun ekonomi sudah tumbuh sejak tahun 1960-an. Berikut adalah ringkasan rencana pembangunan yang pernah dibuat Kerajaan Arab Saudi yang diambil dari Laporan U.S Dept. Of State (2007). Pada periode Rencana Pembangunan I dan II (1970-1980), pembangunan ditekankan pada pembangunan prasarana. Hasil dari rencana itu cukup mengesankan. Jalan

raya panjangnya meningkat tidak kali lipat. Energi listrik meningkat 28 kali lipat, dan kapasitas pelabuhan meningkat sepuluh kali lipat.

Rencana Pembangunan III (1980-1985) dititikberatkan pada pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial yang merupakan perangkat lunak dari pembangunan. Hal ini dapat dimengerti, karena pada tahun 1932, ketika Ibnu Saud memproklamkan negara Arab Saudi, di Arab Saudi belum dikenal sekolah umum. Pada saat itu yang ada adalah pasantren serta madrasah yang mengajarkan ilmu agama serta membaca al Qur'an. Hingga tahun 1980 pendidikan masih rendah, yang ditandai dengan banyaknya tenaga kerja asing karena tenaga kerja Arab Saudi sendiri belum dapat mengisi lapangan kerja yang dibutuhkan. Disisi lain, tingkat pengangguran penduduk asli Arab sangat tinggi. Selain dari pembangunan perangkat lunak, Arab Saudi juga melaksanakan diversifikasi ekonomi, walaupun belum berjalan sesuai harapan. Akan tetapi, pada periode ini sudah tumbuh dua kota industri yaitu Yanbu dan Jubail. Industri yang dibangun masih yang berkaitan dengan minyak, yaitu petrokimia, pupuk, penyulingan minyak serta baja.

Rencana Pembangunan IV (1985-1990) menganggap prasarana dasar sudah cukup lengkap dan yang tetap mendapat penekanan adalah pendidikan dan pelatihan. Peran swasta dalam kegiatan ekonomi sangat didorong, sehingga sasarnya 70% dari PDB bukan minyak berasal dari sektor swasta. Sektor swasta ini pada umumnya bergerak di sektor perdagangan yang merupakan sektor swasta utama, industri, pertanian, perbankan dan perusahaan konstruksi. Agar sektor swasta dapat berkembang, pemerintah memberi insentif bagi sektor swasta. Perusahaan *joint venture* juga didorong oleh pemerintah agar peran swasta pribumi diharapkan lebih besar. Sasarnya adalah sektor swasta memegang 70-80 % saham dalam investasi *joint venture*. Sebagai ilustrasi, mie instan bermerek Indomie yang dibuat di Arab Saudi bukan dibuat oleh perusahaan Indomie tetapi oleh Arabmie.

Rencana Pembangunan V (1990-1999) ditekankan pada pertahanan negara dan sektor pemerintah yang lebih efisien serta pengembangan wilayah. Penciptaan lapangan kerja ditekankan bagi pribumi Arab dan mengurangi tenaga kerja asing. Karena itu, pendidikan dan pelatihan tetap mendapat prioritas. Rencana Pembangunan VII (1995-2000) masih menekankan pada efisiensi pemerintahan dengan penurunan ongkos jasa pemerintahan. Penekanan pada bidang pendidikan dan pelatihan tetap diberikan. Dalam bidang ekonomi, didorong diversifikasi ekonomi terutama di sektor industri dan pertanian melalui peran swasta. Peningkatan tenaga kerja pribumi tetap mendapat perhatian. Rencana Pembangunan VII (2000-2004) menekankan pada diversifikasi ekonomi dan peran swasta yang lebih besar. Dalam periode ini ditargetkan peningkatan PDB sebesar 3,16% per tahun, peningkatan sektor

swasta ditargetkan 5,04% per tahun dan sektor non minyak 4,01% per tahun. Sasaran pemerintah pada periode ini adalah tercipta 817.300 lapangan kerja baru bagi pribumi Arab.

Berdasarkan Rencana Pembangunan di atas, terlihat bahwa hal ini tidak jauh berbeda dari yang diuraikan oleh North mengenai Teori Basis Ekspor. Arab Saudi kaya akan minyak dan diekspor. Ekspor minyak ini memberi dua dampak. Pertama, Arab Saudi mempunyai keuntungan fiskal yang sangat banyak. Kedua, karena adanya aktivitas penambangan minyak tersebut, diperlukan sarana pendukung seperti pelabuhan, jalan raya, serta industri jasa yang melayani aktivitas tersebut (penyediaan bahan makanan, berbagai pelayanan, dll.). Kebutuhan sarana pendukung ini adalah efek pengganda yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan, penyulingan serta pemasaran minyak tersebut. Dengan dibangunnya sarana pendukung yang dilaksanakan pada tahap I dan II di Rencana Pembangunan, maka tumbuh efek pengganda lainnya yaitu tumbuhnya industri-industri yang masih berkaitan dengan minyak seperti petrokimia, penyulingan, dll. Tumbuhnya industri ini menumbuhkan kota industri (Yanbu dan Jubail yang tumbuh pada Rencana Pembangunan III). Adanya kota industri yang dilengkapi prasarana memberikan keuntungan lokasi untuk tumbuhnya industri lain, sehingga industri yang telah berkembang sekarang di Arab Saudi adalah industri minyak mentah, penyulingan minyak, petrokimia dasar, amoniak, gas industri, kaustik soda, semen, pupuk, plastik, logam, perbaikan kapal, perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang serta konstruksi. Dapat dilihat, bahwa tidak semua industri tersebut berkaitan langsung dengan minyak bumi sehingga sudah terdapat diversifikasi.

Akan tetapi efek pengganda tidak berhenti sampai disini. Dengan semakin tumbuhnya industri, pendapatan penduduk dan pertumbuhan kota, diperlukan industri-industri yang betul-betul memenuhi konsumsi setempat termasuk pertanian. Pemerintah Arab Saudi mendorong agar tumbuhnya efek pengganda ini disambut oleh masyarakat Arab Saudi sendiri. Oleh karena itu pertumbuhan sektor swasta didorong serta masyarakat disiapkan untuk mengisi pertumbuhan ini dengan memberikan insentif. Penyiapan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang diberikan cuma-cuma. Jika pada tahun 1932 belum ada satu pun sekolah formal di Arab Saudi, maka pada tahun 2007 telah terdapat lima puluh universitas dan perguruan tinggi. Selain universitas umum, juga terdapat universitas atau perguruan tinggi yang mempunyai program studi khusus seperti *industrial college* yang terdapat di Jubail, Yanbu, Damman serta Jeddah. Untuk bidang perminyakan, terdapat King Fahd University of Petroleum and Mineral. Untuk pariwisata terdapat Prince Sultan College for

Tourism and Bussines. Terdapat juga univesitas dan perguruan tinggi untuk bidang kedokteran, farmasi, agama Islam dan sebagainya. Sekitar 50% dari murid sekolah menengah laki-laki meneruskan ke perguruan tinggi dan wanita sekitar 60% walaupun beberapa program studi tidak menerima mahasiswa wanita. Terlihat bahwa pendidikan sangat ditekankan, demikian juga pelatihan terutama pelatihan untuk tenaga teknik yang diharapkan dapat mengganti tenaga asing yang sekarang sangat banyak (educaton in Saudi Arabia, Wikipedia). Pengaruh dari efek pengganda ini sekarang telah terlihat. Disamping industri berat, tumbuh juga industri ringan yang semua dimiliki swasta, seperti industri makanan (misalnya berbagai macam biskuit dan coklat dengan ciri khas Arab karena memakai kurma, *jelly*, mie, dan lain-lain) dan minuman (susu, jus, dan lain-lain yang dipak), berbagai industri barang kebutuhan sehari-hari seperti sampo, sabun, dan lain-lain, juga tumbuh walaupun yang disebut belakangan ini, banyak yang berupa *joint venture* dengan perusahaan multinational.

Dari uraian diatas, pemerintah Arab Saudi sangat jeli melihat kemungkinan-kemungkinan efek pengganda dari minyak, dan perkembangan efek pengganda ini didorong oleh investasi pemerintah serta insentif terhadap swasta yang semua terencana dalam rencana pembangunan. Selain tumbuhnya PDB, ekonomi menjadi terdiversifikasi sehingga kontribusi minyak dalam PDB sedikit berkurang. Kesejahteraan serta peran penduduk pribumi dalam ekonomi Arab Saudi juga ditingkatkan terus dengan usaha dalam pendidikan dan pelatihan, sehingga Arab Saudi tidak lagi terlalu tergantung pada tenaga kerja asing.

#### **IV. PERBANDINGAN PENGALAMAN ARAB SAUDI DENGAN PEREKONOMIAN WILAYAH DI INDONESIA**

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dan merupakan komoditas ekspor. Pada tahun 1970-an, saat Arab Saudi berkembang pesat karena ledakan harga minyak, ekonomi Indonesiapun yang sedang ditata kembali setelah terpuruk pada masa Orde Lama, menarik banyak keuntungan dari kekayaan minyak Indonesia, sehingga ekonomi Indonesia pun berkembang pesat. Sayangnya, ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru sangat sentralistis. Akibatnya, kemajuan ekonomi tersebut hanya terkonsentrasi di Jawa umumnya, Jakarta khususnya, walaupun sumber daya alamnya berada di wilayah lain. Hingga saat ini, walaupun hutan Indonesia sudah dibabat habis, akan tetapi Indonesia masih kaya akan sumber daya alam lainnya. Kekayaan sumber daya alam ini belum dimanfaatkan untuk perkembangan Indonesia secara optimal. Untuk mengatasi hal ini terdapat dua pilihan. Pilihan pertama, adalah dikelola oleh pemerintah pusat, dengan perencanaan yang terpusat. Pilihan kedua memberikan wewenang dan daya

kepada masing-masing pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam tersebut. Dalam artikel ini, diambil asumsi, bahwa pilihan yang diambil, sejalan dengan jiwa otonomi daerah yaitu pilihan kedua.

Wilayah-wilayah di Indonesia banyak yang mempunyai karakteristik seperti Arab Saudi sesudah Perang Dunia II. Wilayah-wilayah ini (dimaksudkan dengan wilayah disini adalah suatu satuan geografis/sosial-ekonomi sedangkan daerah adalah satuan administrasi, wilayah dan daerah seringkali batasnya bersamaan, sehingga disini kedua istilah tersebut dipakai bersama) mempunyai sumber daya alam yang sangat kaya dan merupakan komoditas ekspor, penduduknya jarang dan tingkat pendidikannya rendah, prasarana sangat kurang, terkadang jauh dari wilayah yang merupakan pusat perkembangan nasional. Sebagai contoh, pulau Papua dengan emas, tembaga dan minyak bumi. Keseluruhan Kalimantan Timur dengan batubara dan minyak bumi termasuk Propinsi Riau. Minyak bumi dengan jumlah yang cukup besar sekarang dieksploitasi lagi di Pulau Jawa. Kayu dulu merupakan komoditas ekspor yang mempunyai nilai ekonomi tinggi pada beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Kemudian juga ekspor yang berupa jasa, yaitu pariwisata sangat potensial dikembangkan di Nusa Tenggara, berbagai wilayah di Sulawesi, Pulau Nias, dan tempat-tempat lain di Indonesia, disamping Bali yang memang sudah berkembang oleh pariwisata.

Keseluruhan wilayah tersebut, sangat tepat untuk dikembangkan dengan memakai teori basis ekspor. Sayangnya, pada masa lalu, hampir semua pendapatan dari ekspor tersebut jatuh ke pemerintah pusat, sehingga daerah tidak dapat mengembangkan efek pengganda yang seharusnya terjadi, sebagaimana yang terlihat dalam kasus Arab Saudi. Pada masa Orde Baru, perimbangan keuangan sangat sentralistis yang diatur oleh berbagai Inpres, sehingga daerah yang kaya akan sumber daya alam tidak memperoleh pendapatan daerah yang cukup memadai untuk mengembangkan daerahnya. Pendapatan terbesar tetap jatuh ketangan pemerintah pusat. Walaupun daerah sangat kaya dengan sumber daya alam, dan mempunyai pendapatan daerah yang tinggi yang ditunjukkan oleh besarnya PDRB, akan tetapi sebagian besar dari PDRB ini diterima oleh wilayah pusat, sebagaimana juga pendapatan pemerintah daerah yang juga sangat sedikit dibandingkan dengan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari daerah ini. Dengan keadaan perimbangan keuangan seperti ini, mustahil wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam ini dapat berkembang seperti yang terjadi pada Arab Saudi. Akibatnya, wilayah yang kaya akan sumber daya alam tersebut tetap tertinggal dan menyebabkan kesenjangan wilayah yang besar.

Pada masa reformasi, terdapat perubahan. Sejalan dengan jiwa otonomi daerah, perimbangan keuangan pun lebih memperhatikan kepentingan daerah. Hal ini tercermin pada UU Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah atau UU No. 25 Tahun 1999 yang telah diperbaiki menjadi UU No. 33 tahun 2004. Dalam UU tersebut seperti yang dinyatakan dalam pasal 6 ayat 5, pendapatan dari sektor kehutanan, pertambangan umum dan perikanan, setelah dikurangi komponen pajak, dibagi 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah. Pada ayat 6.a. dinyatakan, bahwa pendapatan dari sektor minyak dan gas alam, setelah dikurangi komponen pajak, dibagi 85% untuk Pemerintah Pusat dan 15% untuk Pemerintah Daerah. Pada ayat 6.b. dinyatakan bahwa pendapatan dari sektor gas alam, setelah dikurangi komponen pajak, dibagi 70% untuk Pemerintah Pusat dan 30% untuk Pemerintah Daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Dengan melihat UU tersebut, maka daerah-daerah yang kaya akan perikanan, kehutanan dan pertambangan umum, dapat mempunyai pendapatan pemerintah daerah yang tinggi sehingga menjadi daerah yang istilahnya “kaya mendadak”. Sayangnya, banyak daerah yang belum siap untuk dapat memanfaatkan kekayaannya tersebut, sehingga uang yang melimpah tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, ada juga daerah seperti Kabupaten Kutai Timur yang telah mencoba menyusun rencana pengembangan wilayahnya dengan memanfaatkan uang yang melimpah dari kekayaan akan batu bara. Dalam pengembangan wilayahnya, Kutai Timur pun memakai prinsip yang lebih kurang sejalan dengan teori basis ekspor, yaitu pembangunan prasarana, serta diversifikasi ekonomi dengan melalui pertanian dan perkebunan serta pengembangan industri pengolah pertanian dan perkebunan tersebut dan direncanakan pengembangan satu kota industri, yaitu kota Maloy.

Di sisi lain, terdapat juga kota/daerah yang telah siap dan ternyata telah kelihatan hasil perkembangannya, akan tetapi tidak menerima uang perimbangan seperti yang mereka harapkan. Kemudian juga mereka mempertanyakan bagaimana cara menghitung DAU yang mereka terima. Mereka berpendapat bahwa tidak ada kepastian dalam patokan untuk menghitung DAU. Sebagai contoh, di tiga belas kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, tiap tahun DAU-nya ada yang naik, ada yang turun, dan ada yang tetap. Banyak daerah penghasil migas yang menyumbang devisa besar tetapi dana yang dikembalikan ke daerah sangat kecil. Contohnya adalah Bontang. Dari migas, Bontang menghasilkan devisa sebesar tiga puluh triliun, akan tetapi pada tahun 2007 hanya menerima DAU 48 miliar, atau 0,15% dari pendapatan berupa devisa yang dihasilkannya. Tahun sebelumnya Bontang menerima DAU sebesar 75 miliar. Memang pada waktu membicarakan rencana UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaiki menjadi UU no. 33

tahun 2004 terdapat pendapat yang menyatakan, bahwa perimbangan keuangan pusat-daerah, walaupun tidak dimasukkan dalam UU, juga harus mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti luas daerah, jumlah penduduk, besarnya PDRB dan lain-lain (Masyarakat Transparansi Indonesia, Maret 1999). Hal tersebut memang masuk akal. Akan tetapi, rumusan yang tepat dan konsisten dalam penentuan variabel ini haruslah dinyatakan dan dilaksanakan secara konsisten.

## **V. KESIMPULAN**

Artikel ini memberikan kesimpulan, bahwa Teori Basis Ekspor, yang sekarang sudah jarang dibahas, sebetulnya masih sangat relevan bagi banyak negara dan wilayah di dunia ini, sebagai contoh Arab Saudi. Jika teori ini dianggap kurang tepat untuk diterapkan pada Indonesia secara keseluruhan, maka teori ini dapat dipakai sebagai dasar untuk perencanaan wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Wilayah yang dapat menyusun rencana pengembangannya dengan dasar teori basis ekspor ini adalah wilayah yang mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan Arab Saudi pada awal perkembangannya, yaitu memiliki kekayaan alam yang melimpah dan terutama ditujukan untuk ekspor, prasarana terbatas, penduduknya jarang dan tingkat sosial ekonominya tergolong rendah, serta seringkali jauh dari pusat ekonomi nasional.

Akan tetapi pada masa Orde Baru, wilayah-wilayah ini tidak dapat berkembang karena kekayaannya justru tersedot oleh pemerintah pusat. Pada masa reformasi, dengan semangat otonomi daerah, keadaan berubah. Dengan UU Pemerintahan Daerah dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang baru, peluang baru wilayah-wilayah ini untuk dapat merencanakan wilayahnya sejalan dengan teori Basis Ekspor menjadi terbuka. Namun, diperlukan beberapa syarat, yaitu pemerintah pusat harus berusaha agar pendapatan yang didapat pemerintah Indonesia dari eksploitasi kekayaan alam tersebut harus maksimal sehingga tidak ada lagi kontrak karya yang merugikan Pemerintah Indonesia. Dengan demikian pendapatan yang diterima Pemerintah Indonesia dapat naik sampai maksimal. Kemudian, harus terdapat kejelasan tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat-Daerah ini. Daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, harus mempunyai kepastian dalam bentuk fiskal, terutama bagian yang didapat dari hasil kekayaan. Hal ini perlu sebagai dasar dalam menyusun rencana pengembangan. Syarat ketiga dan ini yang terpenting adalah, adanya pemimpin-pemimpin daerah yang jujur, bersih, cakap dan mempunyai keahlian serta visi akan perkembangan daerahnya, serta inovatif. Jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka wilayah-wilayah kaya akan sumber daya alam ini

dapat berkembang dengan baik, maju dan kaya, serta menjadi wilayah perkembangan baru di Indonesia. Wilayah perkembangan baru ini akan menjadi wilayah tandingan dari wilayah yang sekarang sudah berkembang dan cenderung menyedot perkembangan wilayah lain, sehingga perkembangan Indonesia akan lebih tinggi dan merata.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Yousif, Khalifa. 1997. Exports and Economic Growth: Some Empirical Evidence from The Arab Gulf Countries. *Applied Economics* Vol.29 (6): 693-697.
- Country Studies. 2006. Country Profile: Saudi Arabia. Review, Federal Research Division, Washington.
- Caves, Roger W. 2005. Export Base Theory. *Encyclopedia of The City* Vol.1 (6).
- Davis, H. Craig. 1990. *Regional Economic Analysis dan Project Evaluation*, Vancouver, University of Columbia Press.
- Harris, Thomas R., Ebai, George E., Shonkwiler, Scott. 1998, A Multidimensional Estimation of Export Base, *Journal of Regional Analysis and Policy* Vol.28 (1): 3-1.
- Luttrell, Clifton B., Gray, Charles, M. 1970. Metropolitan Area Growth: A Test of Export Base Concepts. Review, Federal Reserve Bank of St. Louis.
- Miloslavsky, E., Shatz, Howard, J. 2006. Services Exports and The States: Measuring the Potential. *Economic Development Quarterly*, Vol. 20, No. 1, 3-2, Sage Publication.
- North, Douglass C. 1955, Location Theory and Regional Economic Growth, in 1964, Friedman, John and Alonso, William (eds), *Regional Development and Planning, a Reader*, Cambridge, The M.I.T. Press.
- Oyewole, P. 2001. Prospect for Developing Country Exports of Services to the Year 2010: Projections and Public Policy Implications. *Journal of Macromarketing*, Vol. 21, No. 1, 32-46, Sage Publication.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. UU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.
- Pfister, R.L. 1976. On Improving Export Base Studies. *Journal of Regional Analysis and Policy* Vol.6, No.1.
- Shaffer, Ron E. 1983. A Test of The Difference In Export Base Multipliers in Expanding And Contracting Economies. *Journal of Regional Analysis and Policy* Vol.13, No.2.
- Simmie, J. 2002. Trading Places: Competitive Cities in the Global Economy. *European Planning Studies* Vol.10 (2): 201-214.
- Taher, N, Salisu, M., Snowden, P.N. 2003. Commodity export dependence and the choice of exchange rate regime: Viewing the poles from Saudi Arabia. *Journal of Development Studies*, Vol.40 (1):164-179.